

## LEMBAGA KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENANGANI KRISIS EKONOMI GLOBAL

**Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyanto**

UNICIMI Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Indonesia

E-mail: ghousun99@gmail.com, fhardiyanto89@gmail.com

### Abstrak

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi untuk terus membawa sektor ekonomi pada taraf atau keadaan yang standar sehingga tidak terjadi krisis ekonomi global yang pernah terjadi pada tahun 2008. Hal ini yang mendasari penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menangani krisis ekonomi global. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran lembaga keuangan sehingga dapat menciptakan kebijakan publik untuk menangani krisis ekonomi global yang dimungkinkan dapat terjadi lagi dengan belajar dari keadaan di masa lalu. Metode yang digunakan adalah jenis kepustakaan dengan mengkaji berbagai hasil penelitian juga kebijakan lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan lembaga keuangan sehingga mampu menghasilkan kebijakan publik yaitu: macroprudential dan microprudential, meningkatkan kekuatan Early Warning System (EWS), meningkatkan kekuatan protokol manajemen krisis, mendorong korporasi dalam melakukan initial public offering, Otoritas moneter dan perbankan dalam memanfaatkan berbagai peluang untuk terus menurunkan inflasi dan suku bunga khususnya suku bunga kredit sehingga lebih kompetitif di ranah dunia. Selain itu juga menggalakkan masyarakat untuk cinta produk dalam negeri dan tidak menggantungkan laju ekonomi pada sistem ekspor.

**Kata Kunci:** lembaga keuangan, kebijakan publik, dan krisis ekonomi global.

### Abstract

*Financial institutions have an important role in determining economic policies to continue to bring the economic sector to a standard level or state so that there is no global economic crisis that occurred in 2008. The purpose of this study is to analyze the role of financial institutions so that they can create public policies to deal with the global economic crisis that may occur again by learning from circumstances in the past. The method used is a type of literature by reviewing various research results as well as financial institution policies. The results show*

<b>How to cite:</b>	Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyanto (2022) Lembaga Keuangan dan Kebijakan Publik Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global, (7) 10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13174
<b>E-ISSN:</b>	2548-1398
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

*that there are several things that financial institutions can do so as to be able to produce public policies, namely: macroprudential and microprudential, increasing the strength of the Early Warning System (EWS), increasing the strength of crisis management protocols, encouraging corporations to conduct initial public offerings, monetary and banking authorities in taking advantage of various opportunities to continue to reduce inflation and interest rates, especially lending rates so that they are more competitive in the realm of the world. In addition, it also encourages people to love domestic products and not depend on the economic pace on the export system.*

**Keywords:** *financial institutions, public policy, and the global economic crisis.*

## **Pendahuluan**

Ekonomi merupakan sektor penting pada setiap negara (Ginting & Dewi, 2013). Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan salah satu asas suatu negara dalam menjalankan operasionalnya terlebih yang berkaitan dengan keuangan (Anggoro et al., 2021). Semakin tinggi ekonomi maka kesejahteraan rakyatpun semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya semakin rendah ekonomi maka kesejahteraan rakyat pun semakin rendah (Wira & Adiputra, 2021). Karena, ekonomi negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Aprilia & Kurniawan, 2018).

Maka dari itu ekonomi merupakan hal vital yang harus dijaga kelestariannya (Purbaya, 2016) demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat (Mulyana, 2017). Sayangnya, meskipun sektor perekonomian telah diusahakan untuk tetap stabil krisis ekonomi pun masih tetap mengancam sehingga pada tahun 2008 Indonesia turut serta terdampak dalam keadaan yang krisis pada sektor ekonomi.

Krisis ini disebut sebagai krisis ekonomi global karena banyak dari negara maju yang mengalami hal ini dimana krisis ekonomi tahun 2008 diawali di Amerika Serikat karena jumlah keuangannya yang defisit dan beragam faktor lainnya (Hidayat et al., 2022).

Keadaan demikian tentu memberikan pengaruh pada negara-negara di Asia termasuk Indonesia (Mutakin et al., 2020). Saat ini ekonomi Indonesia tidak pada masa kritis meskipun baru saja terjadi pandemi covid-19. Namun, situasi krisis ekonomi baik secara lokal maupun global tidak dapat dinafikkan dan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Terlebih di era globalisasi krisis mengenai keuangan dinilai lebih sering terjadi (Raz et al., 2012).

Sebenarnya krisis ekonomi yang dilanda Indonesia bukan hanya tahun 2007. Pada tahun 1997 dan 1998 Indonesia pernah mengalami krisis yang cukup parah bersamaan dengan bangkrutnya beberapa perusahaan keuangan internasional (Sari & Fakhrudin, 2016). Sedangkan krisis yang dimotori Amerika Serikat pada tahun 2008 awalnya pemerintah Indonesia memiliki keyakinan yang positif bahwa krisis tersebut tidak akan berimbas bagi Indonesia, sayangnya keyakinan tersebut keliru, karena nyatanya Indonesia mengalami krisis rupiah karena nilai tukar rupiah terhadap dolar US merosot

bahkan pemerintah pun kesulitan mencari pinjaman karena indeks saham di Bursa Efek Indonesia anjlok (Herawati & Gustan, 2020). Dengan ini maka diketahui bahwa krisis ekonomi disebabkan adanya ketidakseimbangan kondisi makro ekonomi juga krisis mata uang karena anggaran pemerintah mengalami defisit (Nezky, 2013). Terlebih, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi terbuka maka terjadinya fluktuasi ekonomi dunia tentu akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi di Indonesia (Harahap, 2013).

Oleh karena itu, lembaga keuangan sebagai pengatur atau pengelola keuangan negara (Ansori et al., 2019; Muheramtohad, 2017) harus mampu memprediksi keadaan ekonomi Indonesia sehingga meminimalisir dampak dari krisis ekonomi yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Selain lembaga keuangan, pemerintah sebagai organisasi pelayanan publik pun harus memiliki strategi jitu untuk menekan terjadinya krisis ekonomi yang sempat terjadi di tahun 1997, 1998, dan 2008 karena dampaknya yang sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menangani krisis ekonomi global. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi dan menganalisis mengenai peran lembaga keuangan yang kemudian akan memberikan kebijakan publik untuk menangani terjadinya krisis ekonomi global. Penelitian berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam membuat kebijakan khususnya mengenai perekonomian sehingga mampu menekan terjadinya krisis ekonomi global di masa mendatang. Selain itu, penelitian juga berharap bahwa hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi pada penelitian mendatang.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi literatur atau disebut sebagai studi kepustakaan (Sugiyono, 2015). Artinya penelitian ini mengkaji beragam sumber literatur yang diperoleh melalui beragam penelitian maupun sumber-sumber data mengenai keuangan untuk dianalisis secara mendalam hingga diketahui hal-hal yang dapat dilakukan lembaga keuangan sebagai pembuat kebijakan publik untuk menekan terjadinya krisis ekonomi global.

#### **1. Identifikasi Tujuan Penelitian**

- a. Menentukan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi peran lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menangani krisis ekonomi global di Indonesia pada tahun 2023.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis informasi dari literatur terkait untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tanggapan lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam situasi krisis ekonomi global tersebut.

#### **2. Identifikasi Kata Kunci dan Sumber Data**

- a. Mengidentifikasi kata kunci relevan yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti "krisis ekonomi global," "lembaga keuangan," "kebijakan publik," "Indonesia," dan "tahun 2023."

- b. Menentukan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, seperti jurnal akademis, artikel ilmiah, laporan lembaga pemerintah, buku, dan publikasi resmi terkait topik penelitian.
3. Pencarian Literatur
  - a. Melakukan pencarian literatur dengan menggunakan basis data akademis dan perpustakaan digital yang relevan.
  - b. Mencari dan memilih sumber data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian, memastikan relevansi dan kualitas literatur yang digunakan.
4. Seleksi Literatur

Melakukan seleksi literatur dengan hati-hati untuk memilih literatur yang relevan dan memiliki kualitas yang baik untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang diambil.
5. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dari literatur yang telah terpilih dengan mengekstrak informasi yang relevan terkait peran lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menghadapi krisis ekonomi global di Indonesia pada tahun 2023.
6. Analisis Data:

Menganalisis data yang telah dikumpulkan dari literatur dengan pendekatan kualitatif, mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting terkait peran lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menangani krisis ekonomi global di Indonesia.
7. Interpretasi Hasil

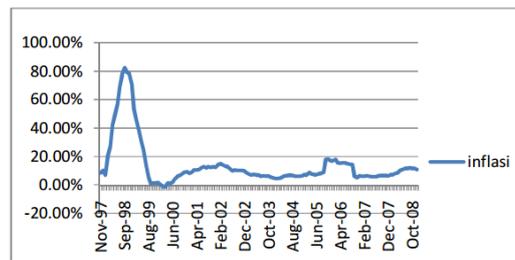
Menginterpretasi hasil analisis untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang peran lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menghadapi krisis ekonomi global di Indonesia tahun 2023.
8. Penyusunan Laporan
  - a. Menyusun laporan penelitian dengan merangkum temuan dan kesimpulan yang dihasilkan dari studi literatur.
  - b. Menyajikan temuan dalam bentuk yang sistematis dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian.
9. Pengecekan Keabsahan Data

Memastikan keabsahan data dengan melakukan seleksi literatur yang cermat dan memilih sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi yang tinggi.
10. Presentasi dan Diseminasi

Menyajikan hasil penelitian melalui presentasi atau publikasi ilmiah untuk berbagi pengetahuan dengan pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas.

## **Hasil dan Pembahasan**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menangani krisis ekonomi global, maka berikut kami paparkan mengenai data inflasi yang tahun 1997-2008 (Fajarna et al., 2021).



Gambar 1: Inflasi tahun 1997-2008.

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di tahun 1997 pada bulan November berada pada angka 8,44% sedangkan pada bulan maret tahun 1998 meningkat menjadi 27,11% dan semakin meningkat hingga bulan September sebesar 82,40%. Masa ini merupakan masa dimana Indonesia berada pada keadaan kritis atau terpuruk. Setelah itu, ekonomi Indonesia kembali menstabilkan diri hingga kembali kritis pada bulan Mei tahun 2008 dimana terjadi inflasi sebesar 10,38% dan puncaknya pada bulan September yang meningkat hingga angka 12,14%. Setelah itu, pemerintah melakukan beragam upaya untuk menurunkan nilai inflasi sehingga pada bulan September berada pada nilai 11,6% dan berangsur-angsur membaik.

Dampak dari krisis ekonomi bagi masyarakat Indonesia tentu mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat. Sehingga lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam hal keuangan atau ekonomi harus terus digalakkan untuk menangani krisis ekonomi global yang bisa saja terjadi di kemudian hari, mengingat arus informasi dan teknologi yang berkembang semakin cepat.

Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai lembaga atau badan yang bergerak pada dunia keuangan dengan menyediakan beragam jasa dan layanan bagi nasabah atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ini maka fungsi dari lembaga keuangan untuk mengontrol laju keuangan di Indonesia (Wiwoho, 2014).

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Indonesia dalam menangani krisis ekonomi diantaranya dengan membentuk sebuah Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang berfungsi untuk mengupayakan penyelesaian krisis (crisis resolution) sebagai bentuk bantuan otoritas keuangan untuk terus melakukan aksinya dengan mengambil beragam keputusan yang tepat dan juga terkoordinasi dengan cepat. Aturan mengenai PMK terdapat pada Undang-Undang No 9 tahun 2016 mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem ekonomi. Mengingat Indonesia pernah berada di posisi krisis ekonomi maka beragam strategi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam antisipasi krisis ekonomi harus digalakkan.

UU No 9 tahun 2016 tersebut berisi mengenai tanggung jawab lembaga keuangan dalam menangani krisis ekonomi yang beranggotakan Kementerian keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan lembaga penjamin simpanan (LPS). KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan) merupakan forum untuk melakukan koordinasi, kerjasama, dan pertukaran beragam informasi mengenai kondisi keuangan sehingga krisis pada sistem ekonomi dapat cepat tertangani dengan baik.

Selain itu, untuk menangani krisis dengan baik tentu pemerintah harus mengetahui faktor yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia terjadi. Misalnya pada tahun 1997-1998 krisis ekonomi disebabkan oleh nilai tukar, suku bunga, rasio pembayaran utang, dan inflasi sedangkan pada tahun 2008 disebabkan indeks harga saham yang menurun, inflasi dan suku bunga yang tidak stabil atau cenderung tinggi (Pratiwi & Sani, 2017). Dengan mengkaji dan menganalisis hal tersebut maka dapat dijadikan acuan untuk menangani dan mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi mendatang.

Sedangkan desain kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya (Falianty & Andhony, 2012): *Pertama*, memperkuat macroprudential dan microprudential. Macroprudential memiliki keterkaitan pada regulasi dan supervisi perbankan juga mengenai sistem keuangan secara menyeluruh untuk meminimalisir ketidak stabilan finansial dan systemic risk. Sedangkan microprudential digunakan untuk mengetahui atau meningkatkan kesehatan perbankan secara individu (Falianty, 2012). *Kedua*, meningkatkan kekuatan *Early Warning System* (EWS) untuk krisis ekonomi. Salah satu bentuk EWS yang penting ialah EMPI (*Exchange Market Pressure Index*) atau disebut sebagai nilai tukar yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kemungkinan terjadinya krisis (Falianty & Hanifah, 2012). Cara membaca EMPI dengan kemungkinan terjadinya krisis apabila nilai EMPI berada di atas garis threshold sebagaimana yang terjadi di tahun 2008. Dengan meningkatkan kekuatan EWS maka pemerintah dapat segera memutuskan kebijakan publik untuk menekan terjadinya krisis. *Ketiga*, meningkatkan kekuatan protokol manajemen krisis. Dimana PKS (Protokol Manajemen Krisis) (Jimmy & Falianty, 2021) mengaitkan beragam lembaga seperti LPS, BI, dan lembaga keuangan lainnya untuk bersama-sama berkoordinasi dalam menguatkan *financial safety*. Terdapat beberapa aspek dalam *financial safety* yaitu *prudential regulation* dan *supervision* yang ditujukan untuk mengurangi nilai risiko terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan. *Lender of the last resort*, *failure resolution* dan *deposite insurance*. *Keempat* mendorong korporasi dalam melakukan *initial public offering* sehingga menerbitkan obligasi korporasi (Kuswardana et al., 2021). Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan capital inflow sehingga pemanfaatan mengenai dana dan likuiditas dapat lebih optimal. *Kelima*, Otoritas moneter dan perbankan dalam memanfaatkan beragam peluang untuk terus menurunkan inflasi dan suku bunga khususnya suku bunga kredit sehingga lebih kompetitif di ranah dunia (Hasanah & Falianty, 2019).

Berdasarkan beberapa hal di atas diharapkan mampu menekan terjadinya krisis ekonomi global. Namun juga terus dikaji dan dianalisis untuk mengetahui beragam kebijakan publik yang tepat. Salah satunya dengan tidak menggantungkan ekonomi Indonesia dalam ekspor mengingat keuangan atau ekonomi dunia tidak selamanya stabil dengan menggerakkan masyarakat untuk lebih leluasa produk dalam negeri sehingga ekonomi Indonesia distabilkan dengan cara bergotong royong. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan nilai investasi di Indonesia sehingga harga saham menjadi lebih tinggi, mempersiapkan dana darurat jika terjadi krisis ekonomi sewaktu-waktu sehingga gampaknya dapat segera ditangani.

### **Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip ekonomi terbuka sehingga apabila dunia mengalami masalah ekonomi misalnya krisis ekonomi global maka Indonesiapun akan mengalami dampaknya. Terlebih di era globalisasi dimana krisis ekonomi lebih sering terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lembaga keuangan dan pemerintah penting menerapkan beragam kebijakan untuk meminimalisir dampak atau risiko terjadinya krisis ekonomi mengingat Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997, 1998 dan 2008. Dampak dari krisis ini cukup parah dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Tentunya pemerintah sebagai pelayan publik ingin terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga lembaga keuangan yang terus berusaha menstabilkan ekonomi melakukan beragam cara untuk menangani krisis ekonomi global diantaranya: memperkuat macroprudential dan microprudential, meningkatkan kekuatan Early Warning System (EWS), meningkatkan kekuatan protokol manajemen krisis, mendorong korporasi dalam melakukan initial public offering, Otoritas moneter dan perbankan dalam memanfaatkan beragam peluang untuk terus menurunkan inflasi dan suku bunga khususnya suku bunga kredit sehingga lebih kompetitif di ranah dunia. Selain itu, pemerintah juga menerapkan budaya cinta produk dalam negeri supaya Indonesia tidak menggantungkan ekonomi dengan ekspor.

Dengan ini maka penelitian berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan bagi pemerintah dan sumber referensi pada penelitian berikutnya.

## BIBLIOGRAFI

- Anggoro, D., Sishadiyati, S., & Wahed, M. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Industri, Pertanian, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Gerbangkertasusila Plus pada Tahun 2015-2019. *OECOMICUS Journal of Economics*, 6(1), 11–18.
- Ansori, M., Nurkamto, J., & Suparno, S. (2019). *Teacher's beliefs and practices in the integration of higher order thinking skills in teaching reading*.
- Aprilia, E., & Kurniawan, E. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di kota samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(3).
- Fajarna, F., Putri, S. K., & Sulaiha, S. (2021). Uji Perasan Bonggol Nanas (Ananas comosus (L) Merr) Sebagai Antikoagulan. *Serambi Konstruktivis*, 3(3).
- Falianty, T. A. (2012). Capital inflows and policy responses: The case of Indonesia in recent financial crises. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 52, 127–146.
- Falianty, T. A., & Andhony, M. (2012). Exchange Market Pressure dan Intervensi Bank Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1).
- Falianty, T. A., & Hanifah, L. (2012). Determinan Inflasi Regional Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 16(1), 45.
- Ginting, A. M., & Dewi, G. P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 117–130. <https://doi.org/10.22212/jekp.v4i2.167>
- Harahap, S. R. (2013). Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar Indonesia: Identifikasi Variabelmakro Ekonomi. *JEJAK*, 6(1), 17–28.
- Hasanah, A. M., & Falianty, T. A. (2019). The Impact of the Exchange Rate and Its Volatility on Output in Asia: The Role of Global Value Chains. *Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018)*, 94–102.
- Herawati, H., & Gustan, M. (2020). Penyebab dan Upaya yang Dilakukan Para Pemerintah Dunia Saat Krisis Global 2008. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 2(1), 22–29.
- Hidayat, A. R., Alifah, N., & Laksana, M. O. (2022). Financial Performance Analysis: Manufacturing Companies In Indonesia Before And Post The 2008 Global Economic Crisis. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(5), 1267–1275.
- Jimmy, C., & Falianty, T. A. (2021). Managing leverage of infrastructure projects: Aggregate and sectoral risk effect. *Journal of Asian Economics*, 73, 101284.

- Kuswardana, I., Djalal Nachrowi, N., Aulia Falianty, T., & Damayanti, A. (2021). The effect of knowledge spillover on productivity: Evidence from manufacturing industry in Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 9(1), 1923882.
- Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65–77.
- Mulyana, R. A. (2017). Peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka maqashidus syariah. *Al-Urban*, 1(2), 155–175.
- Mutakin, I., Ridwan, T., & Hidayat, A. R. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (Studi Kasus Konveksi Jack Tailor di Desa Ciperna). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(01), 50–59.
- Nezky, M. (2013). Pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap bursa saham dan perdagangan Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(3), 89–103.
- Pratiwi, M. R., & Sani, F. N. (2017). Hubungan Waktu Tunggu Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Di Poliklinik Kebidanan Dan Kandungan RSUD Kota Surakarta. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 14(2), 24–30.
- Purbaya, A. G. (2016). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. *OECONOMICUS Journal Of Economics*, 1(1), 71–98.
- Raz, A. F., Indra, T. P. K., & Artikasih, D. K. (2012). Krisis keuangan global dan pertumbuhan ekonomi: Analisa dari perekonomian Asia Timur. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(2), 37–56.
- Sari, P. K., & Fakhruddin, F. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 377–388.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. In *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Wira, W., & Adiputra, Y. S. (2021). Krisis Ekonomi, Kesejahteraan dan Tata Pemerintahan yang Baik: Perspektif Islam. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 83–97.
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87–97.

---

**Copyright holder:**

Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyanto (2022)

**First publication right:**  
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**

